

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Anonimous, 2013, *KUHAP Dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ateng Syafrudin, 1993, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT Raja, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*, Kencana, Jakarta.
- Black Law Dictionary, 1999, By West Group, ST, Paul.
- Buku panduan, 2007, *Penyidikan terhadap anak yang berkonflik hukum*, yayasan samin setara, Yogyakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana dan Praktek*, Djembatan, Djembatan, Jakarta
- Evi Hartanti, 2014, *Tindak pidana korupsi*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun M. Husain, 1991, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Djembatan, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*,

- Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta
- Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*, YA3, Malang.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Shinta Agustina, Saldi Isra, Zainul Daulay, DKK, 2015, *Obstruction of Justice Tindak pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Themis Publishing, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Warsito Hadi Utomo. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.

Jurnal

- Abbas Said, 2012, Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 1.
- Kurnia, Prayoga, dkk. 2015, "Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban". *Jurnal GEMATH*. XXVIII/49
- Mareta, Josefhin. 2018, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak". *Jurnal Legislasi Indonesia* 15,

No. 4

Michael Barama. 2016. Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3. No. 8.

Nefa Claudia Meliala, 2015, "Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana," Jurnal Hukum Unpar 3, no. 1

Sahuri Lasmadi, 2010, "*Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum", Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto.

Siahaan, H. P., Marlina., & Zul, M. (2019). *Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(2), 137-147.

Syaputra Eko, 2021, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Peradilan di Masa Yang Akan Datang". Jurnal Lex Lata 3, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang *Administrasi Pemerintahan*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang *Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 Tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*.

Media Elektronik

Idham Kholid, "*Polda Sumbar: Kasus Indra Catri Dihentikan, Belum Cukup*

Bukti.” <https://news.detik.com/berita/d-5264438/polda-sumbar-kasus-indra-catri-dihentikan-belum-cukup-bukti> diakses pada 10 oktober 2023.

Mario Sofia Nasution, “Polda Sumbar SP3 Kasus dugaan penyelewengan dana Covid-19” <https://www.antaraneews.com/berita/2224082/polda-sumbar-sp3-kasus-dugaan-penyelewengan-dana-covid-19> diakses pada 10 Oktober 2023.

Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No.21/PUU/XII/2014.

